

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sistem pendidikan di Indonesia ternyata telah mengalami banyak perubahan. Perubahan-perubahan itu terjadi karena telah dilakukan berbagai usaha pembaharuan dalam pendidikan. Akibat pengaruh itu pendidikan nasional semakin mengalami kemajuan, pendidikan di sekolah-sekolah telah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan itu terjadi karena adanya dorongan dari pembaharuan tersebut, sehingga di dalam pengajaran pun guru selalu ingin menemukan metode dan peralatan baru yang dapat menambah semangat belajar siswa.

Tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya seluruh potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam kaitannya dengan pembentukan warga Negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peranan yang strategis dalam membentuk perilaku siswa di sekolah maupun di masyarakat dalam keseharian sehingga diharapkan setiap individu mampu menunjukkan perilaku yang baik.

Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, setiap warga negara mampu mengembangkan potensinya, berakhlak mulia, cakap, kreatif dan berkompeten. Perlu ditegaskan kembali bahwa muatan atau mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dimandatkan dalam Pasal 37 UU 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas beserta penjelasannya, dinyatakan dengan tegas bahwa: "...Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air". Adapun yang dimaksudkan dengan Pendidikan Kewarganegaraan dalam Undang-Undang tersebut mencakup muatan atau substansi dan proses pendidikan nilai ideologis Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan yang menekankan pada pendidikan kewajiban dan

**Ai Nisa Nursyamsiah, 2018**

*PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN DEEP DIALOGUE CRITICAL THINKING UNTUK MENINGKATKAN CIVIC INTELLIGENCE SISWA DALAM PEMBELAJARAN PPKN*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

hak bela negara dari warganegara. Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi kembali dikukuhkan wajib adanya mata kuliah agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia yang masing-masing merupakan entitas utuh psikopedagogis/andragogis sebagai mata kuliah untuk program diploma dan sarjana yang dalam pembelajarannya dituntut untuk dapat menerapkan secara interaktif kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstra kurikuler.

Permasalahan lain yang perlu diperhatikan yang sedang dihadapi oleh pendidikan, khususnya pendidikan di Indonesia adalah bahwa isi pembelajaran yang diajarkan sering bersifat teoritis abstrak, sedangkan kenyataan kehidupan menuntut keterlibatan langsung dalam berbagai perkara. Bagi guru memang lebih mudah memaparkan fakta dan pengetahuan atau hukum tertentu kepada siswa, yang dijabarkannya menjadi pengetahuan dan kemudian biasanya dihapalkan, bukan mengaitkannya dengan pengalaman empiris yang akan diamatinya untuk diinterpretasikan dan disimpulkan sebagai suatu pemikiran yang bersifat hipotesis. Padahal, se usai lulus pendidikan, siswa diharapkan dapat menerapkan perolehan pendidikan ke dalam berbagai pekerjaan untuk diimplementasikan.

Menurut Freire (dalam Sindhunata, 2000, hlm. 77) “pada umumnya kebanyakan guru mengajar siswa dengan metode ceramah dan menulis di papan tulis. Secara ekstern, kebanyakan guru menggunakan metode *Banking System*”. Guru mengajar dan siswa diajar, guru mengerti semuanya dan siswa tidak tahu apa-apa, guru berfikir dan siswa dipikirkan, guru berbicara dan siswa mendengarkan, guru mendisiplinkan siswa didisiplinkan, guru memilih dan mendesak pilihannya lalu siswa hanya ikut, guru bertindak dan siswa membayangkan bertindak lewat tindakan guru, guru memilih isi program, dan siswa mengambil begitu saja, guru adalah subjek dan siswa adalah objek dari proses belajar. Dalam metode *banking* di atas, gurulah yang aktif dan siswa menjadi pasif dalam proses belajar mengajar di sekolah. Aktor utama dalam proses belajar mengajar adalah guru dan bukan siswa.

**Ai Nisa Nursyamsiah, 2018**

*PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN DEEP DIALOGUE CRITICAL THINKING UNTUK MENINGKATKAN CIVIC INTELLIGENCE SISWA DALAM PEMBELAJARAN PPKN*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Untuk membantu proses demokratisasi pendidikan, jelas bahwa metode pengajaran di atas perlu dirombak. Metode pengajaran yang membuat anak kurang kreatif, tertekan, tidak bebas dalam mengungkapkan pemikirannya perlu diubah. Beberapa perubahan itu antara lain adalah berpikir kritis, kebebasan berbicara, boleh salah, siswa aktif, masalah masyarakat dibahas secara terbuka, metode ilmiah dengan pencarian bebas, hubungan guru-siswa dialogis. Berpikir kritis, sangat penting bahwa guru dapat melatih siswa untuk berpikir secara kritis tentang masalah yang dihadapi. Siswa perlu dilatih untuk tidak mudah mengiyakan gagasan ataupun pernyataan yang dikemukakan guru atau orang lain. Latihan berpikir kritis juga dapat diterapkan dalam menganalisis atau menanggapi omongan para tokoh, permasalahan publik yang sedang terjadi di masyarakat atau masalah yang sering muncul disurat kabar.

Proses pembelajaran dapat dikatakan suatu pembelajaran yang kontekstual ketika suatu masalah yang terjadi dalam masyarakat dibahas secara terbuka dalam pembelajaran, tetapi pada kenyataannya pembelajaran di sekolah masih sering diasingkan atau dipisahkan dengan keadaan masyarakat, baik yang berhubungan dengan masalah ketidakadilan, konflik sosial, gejolak politik dan masalah sosial lainnya, dimana hal-hal tersebut dapat dijadikan bahan diskusi dalam pembelajaran di sekolah sehingga siswa secara bebas dapat mengungkapkan gagasan dan penilaian mereka terhadap masalah yang terjadi di lingkungan masyarakatnya. Kenyataannya di lapangan hal tersebut tidak dilaksanakan dalam pembelajaran, akibatnya siswa tidak dibiasakan untuk bersikap bijaksana dalam menghadapi persoalan kemasyarakatan yang mereka hadapi.

Pendidik seharusnya dibebaskan dari berbagai hal teknis dan formalisme yang selama ini membelenggunya. Kondisi ini merupakan prasyarat agar pendidik mampu membebaskan peserta didik dari berbagai belenggu yang mengekang imajinasi dan kreativitas serta dalam rangka pembentukan karakter. Untuk itulah pendidikan yang membebaskan dan pendidikan kritis sudah waktunya untuk dijadikan acuan (Sumarsih, 2009, hlm. 55). Kebebasan bukanlah sikap semauanya sendiri. Kebebasan mengarah pada sikap penghargaan akan keunikan serta

**Ai Nisa Nursyamsiah, 2018**

*PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN DEEP DIALOGUE CRITICAL THINKING UNTUK MENINGKATKAN CIVIC INTELLIGENCE SISWA DALAM PEMBELAJARAN PPKN*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kekhasan masing-masing individu sebagai pribadi. Kebebasan pribadi setiap orang dibatasi oleh kebebasan pribadi orang lain, aturan bersama tetap diperlukan, tetapi perlu hati-hati dalam membuat peraturan bersama. Fungsi utama aturan bersama tersebut untuk menjaga agar kebebasan masing-masing tetap terpelihara dan terjamin. Jika aturan yang dibuat justru menghambat bahkan mematikan kebebasan maka aturan tersebut sudah di luar proporsinya. Aturan tetap diperlukan akan tetapi jangan sampai aturan tersebut menghambat perkembangan potensi pribadi yang khas dan unik. Dimensi kebebasan inilah yang membuat manusia mampu mengembangkan seluruh potensinya secara optimal, mampu mengkritisi dan memilih arah hidupnya.

Selain hal di atas, dengan mengaitkan pembelajaran dengan masalah-masalah publik yang timbul dalam kehidupan masyarakat dapat membangun atau mengembangkan kecerdasan warga negara yang dalam hal ini fokusnya adalah siswa. Warga negara yang cerdas (*Civic Intelligence*) ketika mendapatkan suatu informasi atau berita tidak akan langsung menerimanya secara bulat-bulat, informasi yang didapat akan ditelusuri terlebih dahulu kebenarannya dan ketika sudah menemukan suatu kebenaran tidak akan segan untuk memanfaatkan informasi tersebut sebagai media untuk mengembangkan kecerdasan warga negaranya. Begitu pula dalam pembelajaran untuk membentuk warga negara yang cerdas siswa dituntut untuk berpikir secara kritis dalam artian tidak secara pragmatis menerima materi atau isu-isu publik yang disajikan oleh pembelajar atau guru di kelas.

*Civic Intelligence* siswa dapat dikatakan berkembang dalam pembelajaran PPKn manakala siswa dapat secara mendalam memahami materi yang disampaikan dan dapat secara aktif mengikuti pembelajaran. Namun, kurangnya keterampilan guru dalam memanfaatkan sumber informasi dari media elektronik sebagai media pembelajaran menjadi kendala kurang terasahnya pengetahuan yang dimiliki siswa dalam pembelajaran PPKn di kelas, khususnya dalam rangka meningkatkan berpikir kritis siswa.

**Ai Nisa Nursyamsiah, 2018**

*PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN DEEP DIALOGUE CRITICAL THINKING UNTUK MENINGKATKAN CIVIC INTELLIGENCE SISWA DALAM PEMBELAJARAN PPKN*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Permasalahan di atas berkaitan dengan masalah yang ditemukan peneliti ketika mengajar di SMPN 1 Bandung. Berdasarkan studi pendahuluan di kelas VII-5 SMPN 1 Bandung terdapat beberapa permasalahan yang muncul dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yaitu seperti kurangnya pemanfaatan informasi dari media elektronik yang berdampak pada kurangnya kemampuan berpikir kritis siswa. Pembelajaran di kelas masih bersifat *Teacher Center* sehingga kurangnya kemampuan atau keaktifan siswa dalam memberikan pendapat. Padahal, berdasarkan pengamatan penulis potensi siswa kelas VII-5 dalam pembelajaran sangat baik dalam hal berpikir kritisnya. Selain itu juga menurut guru Pendidikan Kewarganegaraan yang mengajar di kelas tersebut menyatakan bahwa peserta didik lebih antusias ketika materi yang disampaikan berkaitan langsung dengan kehidupan nyata dalam masyarakat yang kemudian lebih memudahkannya untuk memahami materi pembelajaran yang disampaikan. Potensi yang dimiliki oleh peserta didik haruslah disalurkan dengan baik oleh guru sebagai pembelajar melalui model pembelajaran yang dapat mengembangkan potensi tersebut.

Salah satu model pembelajaran yang sesuai untuk mengatasi permasalahan di atas adalah model pembelajaran *Deep Dialogue Critical Thinking*. Kegiatan model pembelajaran *Deep Dialogue Critical Thinking* memungkinkan pembelajaran dikonsentrasikan dalam mendapatkan pengetahuan dan pengalaman melalui dialog secara mendalam dan berpikir kritis. Sehingga, peserta didik lebih memahami secara mendalam konsep materi kewarganegaraan yang disampaikan. Selain itu juga, dengan adanya dialog yang dilakukan antar siswa akan membantu meningkatkan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam menerapkan model pembelajaran *Deep Dialogue Critical Thinking* dalam meningkatkan *Civic Intelligence* peserta didik. Oleh karena itu, pembahasan mengenai masalah-masalah tersebut peneliti rancang dalam sebuah judul, yaitu: “Penerapan Model Pembelajaran *Deep Dialog Critical Thinking* untuk Meningkatkan *Civic Intelligence* Siswa dalam Pembelajaran PPKn.”

**Ai Nisa Nursyamsiah, 2018**

*PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN DEEP DIALOGUE CRITICAL THINKING UNTUK MENINGKATKAN CIVIC INTELLIGENCE SISWA DALAM PEMBELAJARAN PPKN*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

## 1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana bentuk perencanaan pembelajaran PPKN melalui model *Deep Dialogue Critical Thinking* untuk meningkatkan *Civic Intelligence* siswa?
- 2) Bagaimana pelaksanaan pembelajaran PPKN melalui model *Deep Dialogue Critical Thinking* untuk meningkatkan *Civic Intelligence* siswa?
- 3) Bagaimana peningkatan kemampuan *Civic Intelligence* siswa melalui model *Deep Dialogue Critical Thinking* dalam pembelajaran PPKN?
- 4) Apa saja kendala dari pelaksanaan pembelajaran PPKN melalui Model *Deep Dialogue Critical Thinking* untuk meningkatkan *Civic Intelligence* siswa?
- 5) Bagaimana upaya guru dalam mengatasi kendala dari pembelajaran PPKN melalui model *Deep Dialogue Critical Thinking* untuk meningkatkan *Civic Intelligence* siswa?

## 1.3 Variabel Penelitian

Jenis variabel pada penelitian ini adalah variabel bivariat, dikarenakan terdiri dari dua variabel. Analisis bivariat dilakukan untuk menguji hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan uji *Chi-square* ( $X^2$ ). Uji *Chi-square* adalah membandingkan frekuensi yang terjadi (observasi) dengan frekuensi harapan (ekspektasi). Dimana dalam penelitian ini variabel independennya (variabel bebas) adalah model pembelajaran *Deep Dialogue Critical Thinking*, sedangkan variabel dependen (terikatnya) adalah *Civic Intelligence* siswa.

## 1.4 Tujuan Penelitian

### 1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh model pembelajaran *Deep Dialogue Critical Thinking* dalam meningkatkan berpikir kritis siswa.

### 1.4.2 Tujuan Khusus

**Ai Nisa Nursyamsiah, 2018**

*PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN DEEP DIALOGUE CRITICAL THINKING UNTUK MENINGKATKAN CIVIC INTELLIGENCE SISWA DALAM PEMBELAJARAN PPKN*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui bentuk perencanaan model *Deep Dialogue Critical Thinking* dalam pembelajaran PPKN .
- 2) Untuk mengetahui pelaksanaan model pembelajaran *Deep Dialog Critical Thinking* dalam meningkatkan *Civic Intelligence* siswa.
- 3) Untuk mengetahui peningkatan *Civic Intelligence* siswa dalam pembelajaran PPKN.
- 4) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi guru dalam menerapkan model pembelajaran *Deep Dialog Critical Thinking* dalam pembelajaran PPKn.
- 5) Untuk mengetahui upaya guru dalam mengatasi kendala dalam menerapkan model pembelajaran *Deep Dialog Critical Thinking*.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Segi Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini akan mengkaji model pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan kemampuan daya kritis siswa dalam pembelajaran PPKn melalui model pembelajaran *Deep Dialogue Critical Thinking*. Dengan demikian temuan penelitian ini akan memperkaya khasanah pengetahuan dibidang model pembelajaran.

### **1.5.2 Segi Praktis**

#### 1) Bagi Siswa

Dari penelitian ini siswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih bermakna, sehingga siswa menjadi lebih menguasai dan terampil dalam pembelajaran pemecahan masalah, dan hasil belajar lebih meningkat dalam mata pelajaran PPKn.

#### 2) Bagi Guru

Informasi hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi serta masukan berharga bagi para guru dalam melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran dengan penerapan

**Ai Nisa Nursyamsiah, 2018**

*PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN DEEP DIALOGUE CRITICAL THINKING UNTUK MENINGKATKAN CIVIC INTELLIGENCE SISWA DALAM PEMBELAJARAN PPKN*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

model pembelajaran *Deep Dialogue Critical Thinking*, khususnya dalam mata pelajaran PPKn.

### 3) Bagi Orang Tua Siswa

Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar betapa pentingnya perhatian orang tua dalam meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar putra-putrinya.

### 4) Bagi Sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi berharga bagi kepala sekolah untuk mengambil suatu kebijakan yang paling tepat dalam kaitan dengan upaya menyajikan strategi pembelajaran yang efektif dan efisien di sekolah.

## 1.5.3 Segi Kebijakan

Manfaat kebijakan dari penelitian dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan penelitian bagi mahasiswa, dosen, perguruan tinggi, guru mitra serta civitas pendidik SMP Negeri 1 Bandung mengenai pengembangan *Civic Intelligence* melalui model pembelajaran *Deep Dialogue Critical Thinking*. Di harapkan melalui penelitian ini mahasiswa, dosen, Perguruan Tinggi, guru mitra serta civitas pendidik SMP Negeri 1 Bandung mampu memaksimalkan model pembelajaran *Deep Dialogue Critical Thinking* untuk meningkatkan *Civic Intelligence* siswa.

## 1.5.4 Segi Isu serta Aksi Sosial

Penelitian dapat dijadikan sebagai alat untuk memberikan pencerahan pengalaman dalam hal pendidikan dengan memberikan gambaran tentang pengembangan *Civic Intelligence* melalui model pembelajaran *Deep Dialogue Critical Thinking* sehingga terciptanya peserta didik dengan kualitas warga negara yang baik.

## 1.6 Hipotesis

Berdasarkan teori-teori dan kerangka berpikir sebagaimana yang akan dijelaskan, maka berikut ini dapat dijadikan hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut. Jika penerapan model *Deep Dialog Critical Thinking* dapat berjalan

**Ai Nisa Nursyamsiah, 2018**

*PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN DEEP DIALOGUE CRITICAL THINKING UNTUK MENINGKATKAN CIVIC INTELLIGENCE SISWA DALAM PEMBELAJARAN PPKN*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu



dengan efektif dan efisien maka *Civic Intelligence* siswa dalam pembelajaran PPKn cenderung meningkat.

### **1.7 Struktur Organisasi Skripsi**

Gambaran mengenai keseluruhan isi skripsi dan pembahasannya dapat dalam sistematika penulisan berikut :

Bab I Pendahuluan, bagian pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang melakukan penelitian, rumusan masalah penelitian, variabel penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional variabel, hipotesis dan struktur organisasi penelitian.

Bab II Kajian Teori, bagian ini berisi tentang konsep, teori dan pendapat para ahli yang berkaitan dan mendukung dengan penelitian ini. Konsep, teori, dan pendapat ahli ini diantaranya tentang tinjauan umum Pendidikan Kewarganegaraan, *Civic Intelligence*, dan model pembelajaran *Deep Dialogue Critical Thinking*.

Bab III Metode Penelitian, bagian ini membahas mengenai komponen dari metode penelitian yaitu, Pendekatan Penelitian, Metode Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek Penelitian, Prosedur Pelaksanaan Penelitian, Instrumen Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bagian ini membahas mengenai pencapaian hasil penelitian dan pembahasannya.

Bab V Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi, pada bab ini berisi tentang simpulan dari keseluruhan proses kegiatan penelitian beserta implikasinya dan rekomendasi dari peneliti kepada pihak-pihak terkait.